

**MANAJEMEN PARIWISATA DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
DI KOTA MAGELANG**

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar



Oleh :

**VINA ANGGI SAFITRI
NPM 1410201174**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen Pariwisata Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Magelang

Nama : Vina Anggi Safitri

NPM : 1410201174

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Skripsi ini disetujui tanggal : 27 Agustus 2018

Pembimbing I



Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.
NIP. 198106092015041001

Pembimbing II



Retno Dewi Pramodia A., S.I.P., M.P.A.
NIP. 199006142015042006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.
NIP. 198106092015041001

**HALAMAN PEGESAHAN PENGUJI
MANAJEMEN PARIWISATA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DI KOTA MAGELANG**

Ditulis oleh:

VINA ANGGI SAFITRI
NPM: 1410201174

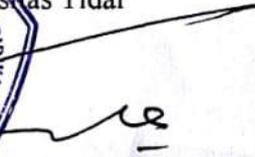
Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.	
NIDN/NIP/NIK	198106092015041001
Sekretaris Penguji	Retno Dewi Pramodia A., S.I.P., M.P.A.	
NIDN/NIP/NIK	199006142015042006
Anggota Penguji	Dr. Bambang Kuncoro, M.Si.	
NIDN/NIP/NIK	195610041986011001

Magelang, 27 Agustus 2018

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.
NIP. 196508271991031001

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.
NIP. 198106092015041001

ABSTRAK

MANAJEMEN PARIWISATA DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KOTA MAGELANG

VINA ANGGI SAFITRI (1410201174)

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik,
Universitas Tidar**

Bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di serahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada dan bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang di miliki yang dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah manajemen pengembangan objek wisata di Kota Magelang.

Tujuan dari penelitian ini memahami manajemen pariwisata daerah dalam pengembangan objek wisata di Kota Magelang dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari manajemen pariwisata daerah dalam pengembangan objek wisata di Kota Magelang dari empat fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah (1) Perencanaan, diawali dengan musyawarah dan tujuannya untuk mengembangkan potensi pariwisata (2) Pengorganisasian, melakukan pertemuan terhadap objek-objek pariwisata meskipun kurang optimal pelaksanaannya berupa pengorganisasian internal dan pengorganisasian eksternal (3) Penggerakan, komunikasi sosialisasi dan pembinaan desa wisata atau pokdarwis dan para pelaku wisata, terdapat hambatan masyarakat podarwis satu dengan yang lainnya (4) Pengawasan, oleh OPD, pemerintah daerah yang langsung membawahi objek wisatanya, pengawasan juga dilakukan pada pokdarwis.

Kata Kunci: Manajemen, pariwisata, daerah.

1. PENDAHULUAN

Bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di serahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada dan bertanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang di miliki yang dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah manajemen pengembangan objek wisata di Kota Magelang. Tujuan dari penelitian ini memahami manajemen pariwisata daerah dalam pengembangan objek wisata di Kota Magelang dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari manajemen pariwisata daerah dalam pengembangan objek wisata di Kota Magelang dari empat fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah (1) Perencanaan, diawali dengan musyawarah dan tujuannya untuk mengembangkan potensi pariwisata (2) Pengorganisasian, melakukan pertemuan terhadap objek-objek pariwisata meskipun kurang optimal pelaksanaannya berupa pengorganisasian internal dan

pengorganisasian eksternal (3) Penggerakan, komunikasi sosialisasi dan pembinaan desa wisata atau pokdarwis dan para pelaku wisata, terdapat hambatan masyarakat podarwis satu dengan yang lainnya (4) Pengawasan, oleh OPD, pemerintah daerah yang langsung membawahi objek wisatanya, pengawasan juga dilakukan pada pokdarwis.

Peneitian dilakukan karena ketertarikan mengenai manajemen pariwisata daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam, sehingga peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana manajemen pariwisata daerah dalam pengemban objek wisata di Kota Magelang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan pendekatan ini menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Metode pengumpulan Data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif Miles Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 404) mengemukakan bahwa Analisis interaktif terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

3. KAJIAN PUSTAKA

3.1. Manajemen

George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna 2011: 3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetemined*

objectives through the efforts of other people atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Fungsi Manajemen

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu, *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan bahwa sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan; dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

3.2. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah. Overman dalam (Pasolong, 2010: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*” meskipun sangat di pengaruhi oleh “*scientific management*”. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antar fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi dengan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

3.3. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu strategi yang di pergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat di kunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah (Paturusi, 2001: 23).

3.4. Objek Wisata

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dinikmati dan menimbulkan kesan tersendiri pada diri seseorang apabila di dukung oleh sarana prasarana yang memadai (Bakarudin, 2008 : 20-31).

3.5. Pariwisata

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di sebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Menurut (Sedarmayanti, 2014: 16) Kepariwisataan adalah keseluruhan proses kegiatan yang di lakukan dan di keluarkan yang di hasilkan oleh masyarakat pengusaha dan pemerintah dan keterkaitannya satu dengan yang lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang di dasarkan dan memperhatikan nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam dan budaya, kepentingan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Magelang adalah sebuah kota di provinsi Jawa Tengah.,terletak sekitar 14 km sebelah utara Kota Mungkid yang menjadi ibukota dari Kabupaten Magelang, sekitar 74 km dari Kota Semarang, sekitar 44 km dari Kota Yogyakarta dan tidak jauh dari Kota Wonosobo sekitar 55 km dan dari Kota Surakarta sekitar 92 km. Luas wilayah Kota Magelang 18.12 km² yang setara dengan 0.06% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang meliputi 3 kecamatan dan 17 kelurahan yaitu : Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kecamatan Magelang Selatan.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, karena itu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan menjadi kewenangan daerah. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari dan memanfaatkan potensi wisata yang ada di dalam daerah, dan yang diberi tanggungjawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pembinaan kepariwisataan di tingkat daerah.

4.2. Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pada manajemen pengembangan objek wisata di Kota Magelang pengembangan objek wisata diawali dengan musyawarah keikutsertaan pokdarwis atau masyarakat yang aktif berpartisipasi agar mengetahui juga memahami perencanaan yang di maksudkan.

Menurut Sukarna (2011: 16) bahwa dalam penyusunan atau pembuatan *planning* harus dibuat secara matang dan diarahkan kepada sasaran yang akan dituju. Karena apabila suatu *planning* yang dibuat tanpa di tentukan tujuan (*objective*) terlebih dahulu. Selanjutnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam mewujudkan Misi ke 4 yaitu mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang. bertujuan dalam mewujudkan pengembangan wisata

yaitu dengan pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata. Yanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Pekanbaru bahwa dalam perencanaan terdapat penetapan tujuan organisasi dan anggaran berkaitan dengan program kegiatan, serta saling berkoordinasi satu sama lain.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perencanaan masyarakat pokdarwis yang berperan aktif sudah sadar walaupun tidak semua. Tujuan untuk mewujudkan pengembangan wisata yaitu pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata di Kota Magelang dengan anggaran yang sudah di tentukan.

2. Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian pengembangan objek wisata, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan ini Dalam pembagian penempatan kerja sendiri bahwa Bidang pariwisata berperan hanya untuk mensosialisasikan seperti 7 sapa pesona pariwisata di lingkungan objek wisata yang harus dimiliki, pembinaan tentang tentang pentingnya sadarnya kepariwisataan. Menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011: 50) *staff* berfungsi untuk membantu pimpinan dalam mewujudkan kelancaran kerja. Kasi pengembangan destinasi, sarana, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata atau dibantu kasi pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata disini membantu Kepala Bidang Pariwisata untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya masing-masing dalam mewujudkan pengembangan keparwisataan. Seperti pengorganisasian pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata dan bekerja sama antar *stakeholder* wisata terkait dengan pengembangan wisata. Yanti (2016) dalam penelitiannya berjudul Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Pekanbaru berupa pengorganisasian internal dari dalam organisasi tersebut dan pengorganisasian eksternal merupakan tindak lanjut dari pengorganisasian internal berkaitan dengan para pelaku pariwisata.

Dari hasil penelitian pada tahap pengorganisasian, seperti pembinaan terhadap pokdarwis. pengorganisasian semua objek wisata melakukan pertemuan

ataupun pembinaan pokdarwis atau PHRI ASITA dll, pelaku lainnya dalam pariwisata oleh perwakilan dari Bidang pariwisata. Berupa pengorganisasian eksternal dan internal.

3. Penggerakan

Instruksi dari kepala bidang pariwisata kepada seksi pengembangan destinasi, sarana, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata atau ke seksi pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata, atau bisa juga dari masyarakat sadar wisata maupun wisatawan yang berkunjung dalam mengenai pengembangan wisata. Pembinaan desa wisata salah satu program yang di laksanakan oleh Bidang pariwisata. Tujuannya agar masyarakat dalam mengembangkan objek wisata dapat maksimal dalam bidang kerjanya dan menurut kesadaran akan dirinya sendiri.

Menurut Sukarna (2010: 83) kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Disini Kasi pengembangan destinasi, sarana, sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata atau Kasi pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata sebagai manajer wisata memimpin atau membina anggota bawahannya agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing seperti atau para penunjang pengembangan pariwisata contohnya pokdarwis, ASITA, PHRI dan kerjasama dengan masyarakat desa wisata dll. Menurut Sukarna (2011: 92) perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan berhasil atau tidaknya tergantung pada komunikasi atau dengan kata lain proses manajemen tidak akan jalan, apabila tidak ada komunikasi yang baik antara manager dan bawahannya atau sebaliknya jadi saling keterkaitan satu sama lain. Koordinasi juga harus di lakukan antara pemerintah dengan masyarakat serta dengan seluruh *stakeholder* terkait Bidang pariwisata.

Tantiana (2018) dalam penelitian yang berjudul Manajemen Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Cafe Sawah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang) dalam pengembangan sumber daya pariwisata mengadakan acara pengembangan pariwisata untuk memberikan informasi saling melakukan komunikasi agar berjalan secara maksimal.

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada tahap pelaksanaan, cukup sesuai melaksanakan komunikasi dengan para pelaku pariwisata diikuti sertakan, walaupun ada kesulitan dari perwakilan masyarakat yang terkadang tidak menyampaikan hasil musyawarah ke masyarakat lainnya.

4. Pengawasan

Menurut Harold Koontz dalam Sukarna (2011: 111) bahwa pengawasan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Dalam penelitian Yanti (2016) yang berjudul Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Objek Wisata Pekanbaru mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan misal dari pemerintah daerah juga dari masyarakat pendukung wisata dalam pelaksanaannya jadi pengawasan lebih terarah terkendali karena langsung dibawah oleh organisasi yang berkaitan.

Pada tahap pengawasan, oleh OPD seperti dalam kaitanya pemasukan PAD terhadap sektor pariwisata bahwa sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) bekerjasama dengan BPKAD. Pengawasan oleh pemerintah daerah yang langsung membawahi objek wisatanya seperti Taman Kyai Langgeng oleh Badan usaha milik daerah, Gunung Tidar oleh Dinas pertanian peternakan dan perikanan, Museum BPK-RI oleh BPK pusat di Jakarta dll. Pengawasan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, pengawasan yang di lakukan oleh Disporapar ini kelanjutan dari terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing objek wisata atau pengawasan dari kasi pengembangan destinasi, SDM dan kelembagaan pariwisata dan kasi pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata.

Dari hasil penelitian dikatakan bahwa pada tahap pengawasan pengembangan objek wisata sudah sesuai dengan tanggung jawab tugas masing-masing tetapi dalam kaitannya di dalam desa wisata atau masyarakat pokdarwis belum struktur atas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pengawasan

dilakukan dengan melakukan sidak atau melalui media *online* untuk *monitoring* semua kegiatan

5. KESIMPULAN

1. Belum sepenuhnya kesadaran dari masyarakat dan pentingnya pengembangan potensi wisata di sekitarnya.
2. Sapta pesona pariwisata sudah dilaksanakan diantaranya keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan dan kenangan pada setiap objek wisata dan desa wisata.
3. Potensi yang berada di Kota Magelang beragam tetapi masih belum memaksimalkan dalam manajemen pengembangan wisatanya.

SARAN

1. Peningkatan sosialisasi pembinaan dalam kaitannya dengan Desa wisata dan kegiatan yang dilakukan agar terorganisir dan maksimal dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Potensi wisata yang belum diketahui dapat di promosikan lewat *event* ataupun media yang aktif seperti *instagram*.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Soedarmayanti. 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cv. Mandar Maju, Bandung.

Yoeti, Oka. A. 2006. *Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya*. Jakarta:
Pradnya Paramitha.

Yoeti, Oka. A. 2001. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*.
Paramitha Pradnya, Jakarta.

Tantina, Winda Ike. 2018. *Manajemen Strategi Pengembangan Objek Pariwisata
Cafe Sawah, Jurnal Administrasi Publik*. Volume 6 Nomor 1.

Yanti, Desi Nova. 2016. *Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam
pengembangan Objek Wisata Danau Buatan di Kota Pekanbaru Tahun
2013-2014*. Volume 3 Nomor 2.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.*

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. 2017. *Buku Statistik dan Potensi
Pariwisata Kota Magelang*. Magelang: Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata